

**PENGURANGAN BERAT TIMBANGAN DALAM JUAL BELI
PISANG DAN TALAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten
Tanggamus)**



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

**UMI NURROHMAH
NPM: 1421030146**

Program Studi: Mu'amalah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**PENGURANGAN BERAT TIMBANGAN DALAM JUAL BELI
PISANG DAN TALAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Gunung Batu, Sumberejo, Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

**UMI NURROHMAH
NPM: 1421030146**

Program Studi: Mu'amalah

**Pembimbing I : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Jual beli pisang dan talas yang berlangsung di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus telah dipraktikkan sejak lama ditengah masyarakatnya. Penimbangan dilakukan ketika pisang dan talas baru dipanen, proses penimbangan dilakukan menggunakan timbangan gantung dan tidak menunggu jarum timbangan dalam keadaan seimbang, kemudian langsung menembak berapa berat pokok pisang dan talas tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas yang terjadi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengurangan berat timbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas yang terjadi di Desa Gunung Batu dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pengurangan berat timbangan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), data primer dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis dan editing. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pihak tengkulak melakukan hal tersebut tanpa adanya dasar yang jelas dan hanya mengira-ngira berapa jumlah berat yang akan dikurangi, biasanya pengurangan yang diterapkan yaitu bekisar antara 10% sampai 20% atau 1 kg-5 kg tergantung dari berat pokok. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan praktik tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak petani akan menanggung kerugian dan ketidakadilan karena menanggung beban pengurangan yang besar. Jual beli dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGURANGAN BERAT TIMBANGAN DALAM JUAL
BELI PISANG DAN TALAS MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan
Sumberejo Kabupaten Tanggamus)**

Nama : **UMI NURROMAH**
NPM : **1421030146**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Mu'amalah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 19750129200003101

Pembimbing II

Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGURANGAN BERAT TIMBANGAN DALAM JUAL BELI PISANG DAN TALAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus) disusun oleh **UMI NURROHMAH** NPM. 1421030146, Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Senin, 17 September 2018

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Penguji II : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Hamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700901199703100**

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." Q.S. Al-Isra' (17):35

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tidak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidup, nikmat sehat, dan segala nikmat yang diberikan kepadaku
2. Kedua orang tua yaitu Bapak Barno dan Ibu Suwarti karena berkat kesabaran beliau, cinta dan kasih sayang beliau, dukungan moral, spiritual dan materi, serta senandung do'a yang ikhlas sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Umi Nurrohmah. Lahir pada tanggal 03 Desember 1995 di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Putri kedua dari dua bersaudara, buah cinta pasangan Bapak Barno dengan Ibu Suwarti.

Pendidikan dimulai dari SD N 3 Margoyoso di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dari tahun 2001 tamat tahun 2007. Melanjutkan pendidikan Menengah Pertama pada SMP N 1 Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dari tahun 2007 tamat pada tahun 2010. Melanjutkan pendidikan pada jenjang Menengah di SMA N 1 Sumberejo, dari tahun 2010 tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil program studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah member rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kita sehingga dapat terselesaikan penelitian ini yang berjudul: “Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam” (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupten Tanggamus)

Dalam skripsi ini sangat banyak kekurangan dan kelemahan, namun bimbingan berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana adanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, S.Ag. Selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H. Selaku ketua jurusan Muamalah dan Khoiruddin, M.Si. Selaku Sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
4. Hj. Nurnazli S.H., S.Ag. M.H. dan Hj. Linda Firdawaty, S.Ag. M.H. Selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikiran serta bimbingannya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini

5. Tim penguji skripsi, Drs. H. Khoirul Abror, M.H. Selaku ketua sidang, Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. Selaku penguji I, Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag. M.H. Selaku penguji II, dan Muslim, S.H.I., M.H.I. Selaku sekertaris sidang.
6. Bapak dan Ibu dosen dan seluruh Civitas Akadmik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber data dalam penyelesaian skripsi ini
8. Bapak Sudibyo selaku lurah Desa Gunung Batu, serta seluruh pegawai di kantor Desa Gunung Batu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakakku Ari Yanto dan keponakan saya Zahra Aulia Prabowo yang selalu memberikan hiburan, semangat yang luar biasa, serta selalu memberikan pertolongan dengan ikhlas sehingga dapat terselesaikan skripsi ini
10. Sahabat terbaikku sejak menjadi mahasiswa baru sampai menyelesaikan kuliah, Siti Rohmawati, Yulia Dinda Pertiwi, Mutiara Awaliyah, Nugraheni Fajar Prastiwi, Eka Kurniawati yang selalu setia membimbing, menasehati, mengingatkan dan memberikan semangat tanpa pamrih
11. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

Semoga amal, jasa, bantuan dan petunjuk serta dorongan yang telah diberikan dicatat oleh Allah SWT, sebagai amal shalih dan memperoleh ridho-Nya. Akhirnya, diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 03 September 2018

Umi Nurrohmah
NPM: 1421030146

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Jual Beli	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	15
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
3. Bentuk-Bentuk Jual beli.....	29
4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	30
B. Takaran atau Timbangan dalam Hukum Islam	33
1. Pengertian Takaran atau Timbangan dan Dasar Hukum Islam	33
2. Macam-Macam Timbangan	36
3. Pengurangan Berat Timbangan Menurut Hukum Islam	38

4. Prinsip-prinsip Hukum Islam Terkait Takaran atau Timbangan.....
41
- C. Urf
 1. Pengertian Urf
 2. Landasan Hukum Urf
 3. Macam-macam Urf
 4. Kedudukan Urf.....

BAB III LAPORAN PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 1. Legenda dan Sejarah Desa Gunung Batu.....
 2. Kondisi Umum Desa Gunung Batu.....
 3. Masalah yang Dihadapi Desa Gunung Batu
- B. Sistem Jual Beli Pisang dan Talas di Desa Gunung Batu
- C. Faktor dan Dampak Adanya Praktik Pengurangan Berat Timbangan dalam Sistem Jual Beli Pisang dan Talas di Desa Gunung Batu

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Praktik Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas di Desa Gunung Batu.....
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas di Desa Gunung Batu

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pergantian Kepala Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo.....	50
2. Daftar Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas	50
3. Respon Petani Pisang dan Talas Terhadap Penggunaan Timbangan dan Penerapan Pengurangan Timbangan	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini bagi para pembaca, maka sebaiknya diuraikan secara singkat dan dijelaskan makna istilah yang digunakan dalam judul ini, judul skripsi ini adalah “Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam” (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus).

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

Pengurangan adalah proses, cara, perbuatan mengurangi atau mengurangkan; hitungan tentang mengurangi; penyusutan; pembatasan (hak, kuota, dan sebagainya).¹

Berat adalah besar ukurannya (diantara jenisnya atau benda-benda yang serupa), besarnya tekanan suatu benda apabila diangkat, ditimbang, dsb: bobot; timbangan; akibat sakit,--nya berkurang.²

Timbangan adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran massa suatu benda. Timbangan/neraca dikategorikan dalam sistem mekanik dan juga

¹ Aplikasi KBBI Qtmedia didownload pada tanggal 25 Januari 2018, pukul 07:15 PM

² KBBI Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Balai Pustaka, (Jakarta, 2002) h. 138

elektronik/digital. Pengurangan timbangan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengurangan/pemotongan berat (*massa*) timbangan. Dalam pembahasan skripsi ini meneliti mengenai pengurangan berat timbangan yang dilakukan oleh pihak tengkulak, dan perbuatan tersebut memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

Jual beli adalah perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.³ Sedangkan secara terminologi menurut pendapat Ulama Hanafiyah jual beli didefinisikan sebagai “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.⁴

Hukum Islam menurut Amir Syaifuddin, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, dan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini adalah mengurangi berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas menurut pandangan Hukum Islam.

³Hendi Suhendi., M. Si. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) h. 67

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 113

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul “Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Prespektif Hukum Islam” ini adalah:

1. Alasan Objektif, sering terjadi pada masyarakat khususnya di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus jual beli dengan cara mengurangi berat timbangan khususnya dalam jual beli pisang dan talas sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisis dari sudut pandang Hukum Islam.
2. Alasan Subjektif, penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, tempat menimba ilmu dan memperdalam ilmu pengetahuan, dimana kajian muamalah yaitu menurut Hukum Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah salah satu aspek Mu'amalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dilakukan dimana saja tidak hanya dalam pasar tetapi juga dapat dilakukan di tempat yang didalamnya terdapat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem atau mekanisme jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam. Jual beli, tukar-menukar kebutuhan, sewa-menyewa dan transaksi lain dalam Islam dimaksudkan untuk sarana tolong-menolong antar masyarakat agar mencapai kemaslahatan umum, dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan pertalian saudara antar masyarakat akan semakin erat.

Jual beli yang terjadi di masyarakat sudah menjamur karena jual beli dijadikan sebagai salah satu lahan pendapatan mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Desa Gunung Batu merupakan salah satu desa yang berada dibawah pemerintahan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Kebanyakan masyarakatnya adalah suku Jawa dan 100% penduduknya beragama Islam, kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani padi, kopi, pisang dan talas. Sebagian besar petani pisang dan talas Desa Gunung Batu menjual hasil buminya kepada para tengkulak yang berada disekitar rumah dibandingkan dengan menjualnya ke pasar karena menempuh jarak sekitar ± 2 km dari kebun mereka, pasar yang biasa menerima pisang dan talas hanya ada pada pagi hari yaitu pada hari senin dan kamis dimulai sekitar pukul 05:00 WIB, pisang yang dijual belikan di pasar tradisional hanya pisang yang sudah matang, sedangkan pisang yang belum matang atau yang baru diambil dari pohon biasanya langsung dijual kepada tengkulak atau harus menunggu sampai pisang tersebut dalam keadaan matang kemudian baru bisa dijual ke pasar. Tengkulak dalam pengertian KBBI adalah *teng-ku-lak* pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama); *peraih*: harga beli para-umumnya lebih rendah daripada harga pasar.⁶ Hal yang dipermasalahkan dalam jual beli pisang dan talas ini adalah adanya praktik pengurangan berat timbangan yang diterapkan oleh pihak tengkulak, pihak petani pun hanya pasrah dengan ketentuan

⁶ <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/tengkulak.html>, diakses pada pukul 20:20 WIB pada hari Selasa, 23 Oktober 2018

tersebut karena masyarakatnya yang masih awam terhadap hukum ekonomi syariah atau Hukum Islam, oleh karena itu jual beli yang terjadi di masyarakat Desa Gunung Batu perlu dilandasi dengan Hukum Islam agar tidak menuju dalam transaksi muamalah yang dilarang.

Islam telah mengatur tatacara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Adapun syarat dan jual beli itu antara lain adanya ijab dan kabul ini haru dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berinteraksi, harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai wewenang melakukan transaksi tanpa adanya paksaan, terjadinya pengurangan timbangan ini dilakukan oleh pihak tengkulak, pihak tengkulak pisang dan talas menerapkan praktik pengurangan berat timbangan tanpa adanya dasar yang jelas hanya mengira-ngira, dan memutuskan berapa berat yang akan dikurangi secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan pihak penjual terlebih dahulu.

Dalam Islam sudah ditentukan tata cara jual beli yang baik dan benar dengan memperhatikan timbangan, seperti pada yang tercantum dalam Q.S Asy-Syu'ara (26):181-183

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ وَلَا

تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu

*merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.*⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa Nabi Syu’aib memerintahkan kepada mereka agar menyempurnakan takaran dan timbangan, dan melarang mereka melihat (mengurangi) takaran dan timbangan maka sempurnakanlah takaran mereka dan janganlah kalian mengurangi takaran mereka yang menyebabkan kalian serahkan kepada mereka pembayaran yang kurang. Tetapi bila kalian mengambil dari mereka, maka kalian memintanya dalam keadaan sempurna dan cukup. Maka ambillah sebagaimana yang kalian serahkan, dan serahkanlah sebagaimana yang kalian ambil, dan janganlah mengurangi harta benda mereka, membuat kerusakan pada ayat diatas maksudnya ialah membegal orang-orang yang melewati jalan maka orang-orang itu akan diazab oleh Allah.

Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian guna menambah ilmu pengetahuan mengenai pengurangan berat timbangan menurut Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas di Desa Gunung Batu?

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010) h.

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas di Desa Gunung Batu?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui praktik pengurangan berat timbangan yang selama ini sudah terjadi di Desa Gunung Batu.
- b. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas di Desa Gunung Batu.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Secara Teoritis, berguna sebagai upaya menambah pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas dilihat dari sudut pandang Hukum Islam. Selain itu, diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas Akademik Fakultas Syariah Jurusan Muamalah pada khususnya serta menambah wawasan dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Dari Praktis, Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari obyek penelitian yang sebenarnya. Dalam hal ini validitas hukum yang menggejala dalam kehidupan masyarakat khususnya kaum muslim yang melakukan, mengalami atau bersinggungan langsung dalam hal jual beli pastinya membutuhkan data-data faktual dan akurat. Maka lebih dapat dikategorikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami tentang apa yang dijalani oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lainnya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁸ Penelitian lapangan (*Field research*) berlokasi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Sebagai alasan pemilihan lokasi penelitian adalah adanya masyarakat yang masih melakukan pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas.

⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994)h.142

Selain penelitian lapangan juga dilakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian yang terdahulu.⁹ Sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif (pemaparan) dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, serta peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian ini. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung ditempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian. Berdasarkan pengertian diatas maka penelitian deskriptif yang dimaksud adalah penelitian yang memaparkan dan menggambarkan

⁹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014) h.9

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Op.Cit*, h. 50

peristiwa hukum tentang perilaku masyarakat yang melaksanakan sistem pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹¹ Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang terdapat di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus sebagai tempat penelitian dan praktik pelaksanaan pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan-peraturan hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadist, dll. Serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003) h.30

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹² Menurut Nana Sudjana, populasi adalah “sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala atau objek”.¹³ Jadi populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang akan menjadi fokus penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang tengkulak dan 20 orang petani yang bertempat tinggal di Desa Gunung Batu.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.¹⁴ Teknik sampel yang akan digunakan adalah teknik random sampling yaitu pengambilan sampel dipilih secara acak yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Dalam penelitian ini menetapkan sampel yaitu 3 orang tengkulak dan 5 orang petani yang bertempat tinggal di Desa Gunung Batu.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 3*, (Jakarta, Bima Aksara, 1981), h.202

¹³ Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Jakarta, Rineka Cipta edisi revisi III cet ke-4, 1998) h. 62

¹⁴ *Ibid*, h. 104

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- 1) Observasi yaitu “*pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki*,”¹⁵ maksudnya adalah melakukan peninjauan di lokasi penelitian melalui proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap pengurangan berat timbangan dalam jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Batu.
- 2) Wawancara (*interview*) yaitu suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.¹⁶
- 3) Dokumentasi yaitu dalam buku karya Koentjaningrat menyatakan bahwa “metode dokumentasi” adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda.¹⁷

¹⁵ Muhammad Nasir, *Metodelogi Penelitian Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986) h.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h.187

¹⁷ Koentjoroningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991) h. 29

6. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan data kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.¹⁸
- b. *Sistemazing*, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁹ Menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis, data yang diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

7. Analisia Data

Data penelitian skripsi ini dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁰ Dalam menganalisis hasil penelitian, uraian tersebut menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menelaah suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.²¹ Secara umum, pelaksanaan jual beli seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2008), h. 245

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) h. 35

²⁰ *Ibid.* h. 127

²¹ Lexy. J Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya) h. 8

Islam tanpa adanya pengurangan timbangan. Jika pengurangan berat timbangan tersebut memang benar dilakukan seharusnya harus ada kesepakatan antara pihak petani dan tengkulak sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) dari ba'i (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.²² Jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi yaitu menjual dan membeli.

Menurut ulama Hanafiah

مُبَا دَلَّةٌ مَّالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan”.

Menurut Imam Nawawi

مُقَا بَلَّةٌ مَّالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.”

²²Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permata Publishing, 2016), h. 102

Menurut Ibnu Qudamah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِكُنَا وَ تَمْلِكُنَا

*“Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.*²³

Beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang, harta dengan harta dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati kedua belah pihak.

Dibenarkan *syara'* dalam artian baik berupa proses atau objek yang diperjual belikan. Benda yang diperjual belikan harus dapat diserahterimakan dan merupakan milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.²⁴

Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar-menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada

²³*Ibid*, h. 103

²⁴*Ibid*, h. 104

masyarakat pada umumnya. Mereka menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari. Mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang, namun pada saat ini orang yang tinggal dipedalaman, sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar.²⁵

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada

²⁵M. Ali Hasan, *Op.Cit.* h. 115

dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁶

Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum merupakan bagian dari muamalah yang terus berlangsung hingga saat ini dan tidak dapat dihindari dalam hidup bermasyarakat, jual beli mempunyai hukum atau aturan yang jelas dari Allah SWT yang dituliskan baik di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan menjadi ijma' para kaum muslimin.

Dasar hukum jual beli diambil dari sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

Firman Allah dalam Q.S An-Nisa' (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat diatas menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil,

²⁶ Lihat al-Jaziri, *Fiqh Madzahib al-Arba'ah*, (Jakarta) h. 151

yaitu yang tidak dibenarkan oleh Hukum Islam. Boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha dan ikhlas. Dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh, dan Allah menerangkan semua ini sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih sayang kepada kita.

Q.S Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَنَّهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Tafsir surat di atas menurut Ibnu Katsir adalah melalui ayat ini, Allah menceritakan bahwa seorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan setan. Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba. Riba yang

dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini apabila pelakunya bertobat tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan diampuni oleh Allah. Sedangkan siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya.

Dari Abu Qatadah Al-Anshari Radhiallahu ‘anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفَقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

“Jauhilah oleh kalian banyak bersumpah dalam berdagang, karena dia (memang biasanya) dapat melariskan dagangan tapi kemudian menghapuskan (keberkahannya),” ²⁷

Salah satu profesi yang dianjurkan dalam Islam bahkan sering tersebut dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah profesi petani dan pedagang. Karenanya banyak sekali sahabat Rasulullah SAW berprofesi menjadi petani atau pedagang, hanya saja di dalam Islam setiap profesi yang dibenarkan untuk ditempuh tujuannya bukan semata-mata untuk menghasilkan uang atau meraih kekayaan, akan tetapi bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dari hasil jerih payahnya.

²⁷ Kitab Al-Musaaqaat, bab An-Nahyu ‘Anil Half Fil Ba’i (xi/45)

Dasar Hukum dalam Ijma'

Ijma' menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang suatu hal seperti perkataan orang, sedangkan menurut istilah adalah kesepakatan mujtahid dari ijma' umat Nabi Muhammad dalam suatu masa setelah beliau wafat.²⁸ Imam Al-Ghazali merumuskan ijma dengan kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama, rumusan Al-Ghazali ini memberikan batasan bahwa ijma' harus dilakukan oleh umat Muhammad yaitu umat Islam. Tetapi harus dilakukan oleh seluruh umat awam. Al-Ghazali pun tidak memasukkan dalam definisinya bahwa ijma' harus dilakukan setelah wafatnya Rasulullah.²⁹ Sedangkan ijma' menurut pengertian para ahli Ushul Fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa ketika Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.³⁰

Dasar hukum ijma' berupa Al-Qur'an dan Al-Hadits

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5):49

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 224

²⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al ushul jilid 1* (Dar al Kutub al 'ilmiyah, Beirut, 1983) h. 110

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, Toha Putra Group, 1994) h. 56

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ
 مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ
 كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Perkataan ulil amri yang terdapat pada ayat di atas berarti hal, keadaan atau urusan yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. Ulil amri dalam urusan dunia ialah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang ulil amri dalam urusan agama adalah para mujtahid. Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para ulil amri itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin.

a. Al-Hadits

Bila para mujtahid telah melakukan ijma' tentang hukum syara' dari suatu peristiwa atau kejadian, maka ijma' itu hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan apalagi kemaksiatan dan dusta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى خَطَاٍ (رواه ا بو داود والترمذی)

“Umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan.(HR. Abu Daud dan Tirmidzi.”

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dan diisyaratkan serta dihalalkan. Jual beli dengan sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan pihak-pihak didalamnya.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dan pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syaratnya.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) Shigat (ijab qabul).³¹

Shigat/akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul

³¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) h. 34

menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.³²

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat pembelian, dan ijab qabul atau serah terima. Transaksi jual beli harus memenuhi rukun tersebut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur.³³ Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.

³² Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 70

³³ Al-kahlani, *Subul al-Salam* (Bandung) h.4

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat. Syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Dari Segi Subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- 1) Berakal sehat

Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.

- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

- 3) Kedua belah pihak tidak mubadzir

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan

hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

4) Baligh atau Dewasa

Baligh atau dewasa menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.³⁴

- b. Dari Segi Objeknya, yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

1) Suci barangnya

Maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.

³⁴ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) h. 130

2) Dapat di manfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmati suaranya (radio, TV, burung, dll) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan.

3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.

4) Mampu menyerahkan

Maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5) Mengetahui

Maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam

suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

6) Barang yang diakadkan ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.³⁵

- c. Dari segi lafadz atau ijab qabul, Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.³⁶

Rasa suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing, ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah

³⁵Chairuman Pasaribu, *Op.Cit.* h. 37-40

³⁶ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Jakarta: 2002) h. 65-66

cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal. Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.³⁷

3. Bentuk-Bentuk Jual Beli

a. Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu diisyaratkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

³⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet-I h. 101-104

b. Jual Beli yang Batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak diisyaratkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamar*).

c. Jual Beli yang Fasid

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil.

Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.³⁸

4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

1. Jual beli barang yang belum diterima

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang tersebut.

2. Jual beli seorang muslim dengan muslim lainnya

Seorang muslim tidak boleh jikasaudara seagamanya telah membeli suatu barang seharga lima ribu rupiah misalnya, kemudian ia berkata kepada

³⁸M. Ali Hasan, *Op.Cit.* h. 134

penjualnya mintalah kembali barang itu dan batalkan jual belinya dan aku akan membelinya darimu seharga enam ribu.

3. Jual beli barang-barang haram dan najis

Tidak boleh menjual barang haram, barang-barang najis dan barang-barang yang menjurus kepada haram berupa minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman beralkohol.

4. Jual beli gharar

Adalah jual beli yang mengandung kesamaran, menurut Ibnu Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang yaitu:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya
- b. Tidak diketahuinya harga dan barang
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga
- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- e. Menghargakan dua kali pada satu harga
- f. Jual beli munsbadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seseorang melempar bajunya maka terjadilah jual beli
- g. Jual beli muammassah, yaitu apabila memegang atau mengusap kain ia wajib untuk membelinya.³⁹

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74

5. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli seperti ini haram hukumnya.
6. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak.
7. Jual beli dengan muhaqallah
 Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud muhaqallah disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangka riba.
8. Jual beli dengan muzabanah
 Menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti itu mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "kujual buku ini seharga 10.000 dengan tunai atau 15.000 dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata "aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku.
9. Jual beli dengan syarat (iwadhi mahjul)
 Jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli yang menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata

“aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku.

10. Larangan menjual makanan hingga dua kali takar

Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli

11. Menemui orang di desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli

benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.

12. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain, seperti seorang berkata

“tolaklah harga tawaran itu, nanti aku yang akan membelinya dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakiti hati pembeli yang lain.

B. Takaran atau Timbangan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Takaran atau Timbangan dan Dasar Hukum Islam

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah.⁴⁰

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding.⁴¹

Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah

⁴⁰ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h.159

⁴¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Hida karya, 1997) h.1649

suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang.

Dasar Hukum Islam tentang Takaran atau Timbangan, seperti dalam firman Allah dalam Surat Q.S Hud (11):84-85

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُورِمَّ عَبْدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّىٓ أَرٰنَكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝٨٤
وَيَنْقُورِمَّ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَّاهُمْ وَلَا تَعْتُوا
فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝٨٥﴾

84. “Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).”

85. “Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Nabi Syu'aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi dengan mengatakan, “mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan di muka bumi dan orang yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya merusak dan

penjahat di muka bumi. Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk kezaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah. Seperti sabda Rasulullah SAW:

وَمَا يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمُنُونَةِ، وَجَوْرِ
السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا، وَلَمْ يَمْنَعُوا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَاءُ
ئِمْ لَمْ يُمْطَرُوا... اخرجہ وغیرہ

*“Tidaklah mereka mengurangi takaran timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan zakat (tidak membayarnya) kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka (hujan tidak turun), dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan”*⁴²

Maksud dari ayat di atas adalah mereka ditimpa paceklik dan kekeringan, yaitu Allah SWT menahan hujan dari mereka (Dia tidak menurunkan hujan untuk mereka), dan jika bumi menumbuhkan tumbuhan maka Allah akan mengirimkan musibah kepada mereka berupa serangga, ulat dan hama penyakit lain yang merusak tanaman. Dan jika tanaman itu berubah maka buahnya tidak ada rasa manis dan segar.

Disebutkan didalam hadits dari Ibnu ‘Abbas ra ia berkata:

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا أَحْبَثَ النَّاسَ كَيْلًا

⁴² Ibnu Majah (2/1322) no. 4019, Abu Nu’aim, al-Hakim dkk.

“Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, mereka (penduduk Madinah) adalah termasuk orang yang paling curang dalam takaran.”

Maksudnya, penduduk Madinah dan kaum Anshar sebelum datangnya Nabi SAW ke Madinah, dahulu mereka sudah terbiasa dengan bertransaksi dalam jual beli. Mereka adalah manusia yang paling curang dalam takaran. Yakni, mereka curang dalam masalah takaran dan timbangan, dan mereka menguranginya dalam masalah takaran dan timbangan, dan mereka menguranginya dalam masalah itu. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, Allah SWT menurunkan beberapa ayat Al-Qur'an.

2. Macam-Macam Timbangan⁴³

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan dalam proses penimbangan diantaranya:

1. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
2. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan. Timbangan ini

⁴³<https://www.caratekno.com/2013/10/macam-macam-timbangan-yang-sering.html>, diakses pada pukul 19:30 WIB pada hari Selasa, 23 Oktober 2018

sekarang lagi trendy sebab, timbangan mungil seharga Rp 50.000 ini sanggup menimbang hingga 40 Kg.

3. Timbangan *Hybrid*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan *Hybrid* ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan *Hybrid* menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.
4. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah: timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.
5. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
6. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan di permukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.
7. Timbangan Duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering kita ketahui *Platform Scale*.
8. Timbangan Meja, yaitu timbangan yang biasanya digunakan di meja dan rata-rata timbangan meja ini adalah timbangan digital.
9. Timbangan *Counting*, yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah, jadi barang bisa timbangan persatuan sebagai contoh timbangan *counting* ini sering digunakan untuk menimbang baut, mur, Spare part mobil dan sebagainya.

10. Timbangan *Platform*, yaitu timbangan yang memiliki tingkat keprecisian lebih tinggi dari timbangan *Intai*, timbangan *Platform* merupakan solusi dalam penimbangan di berbagai industri baik industri retail maupun manufacturing.
11. Timbangan Hewan/Ternak, yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan baik sapi, kerbau maupun kambing serta sejenisnya.
12. Timbangan Emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas (logam mulia).

3. Pengurangan Berat Timbangan Menurut Hukum Islam

Jual beli merupakan hal yang terus berlangsung dan berkembang ditengah masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Akan tetapi jual beli tidak semudah yang terlihat, didalam jual beli terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang khususnya umat muslim jual beli yang diperbolehkan dan juga jual beli yang dilarang.

Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan kebenaran karena hal itu merupakan nilai terpenting. Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena seharusnya jual beli itu tidak mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam Islam sudah diatur tentang pengurangan neraca dan perintah untuk menegakkan timbangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rahman (55):9

وَأَقِيمُوا آلَوزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Surat di atas menjelaskan bahwa (Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang (dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi berat timbangan yang ditimbang itu. Maka dari itu, tegakkanlah timbangan secara adil pada setiap transaksi yang dilakukan, dan janganlah mengurangi timbangan.

Ali r.a berkata janganlah meminta hajat kebutuhanmu yang riskinya di ujung takaran dan timbangan, dan alangkah tepat hikmat yang berkata: sungguh celaka orang yang menjual habbah (biji-bijian) dan dikurangi *jannah* (surga) sebagai langit dan bumi atau membeli habbah (biji-bijian) untuk ditambah dengan jarang jahannam, yang sekiranya bukit di dunia dimasukkan kedalamnya pasti akan mencair, yaitu orang-orang yang menjual dan curang dalam timbangan sehingga mengurangi hak orang lain berarti membuang

surga, dan orang yang melebihi lalu melebihi dari takaran yang semestinya sehingga menambah dengan jurang ke dalam jahannam.⁴⁴

Sebuah hikayat menyatakan:

Ketika seseorang menghadiri orang yang sedang akan meninggal, maka diajarkan padanya supaya membaca *laa illaha ilallah*, tiba-tiba orang tersebut berkata saya tidak dapat membacanya karena jarum timbangan itu mengganjal di lidahku sehingga aku tidak dapat mengucapkannya. Lalu kemudian ditanya: tidakkah anda dulu menepati timbangan? Jawabannya benar, tetapi kemungkinan ada kotoran yang tidak saya bersihkan sehingga merugikan hak orang lain tidak terasa. Demikian camkanlah hamba Allah, jika sedemikian keadaan orang yang tidak sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah dengan orang yang sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah orang yang sengaja membuang surga karena sebutir atau menanam bara api neraka dengan sebutir biji buah.⁴⁵

Pengurangan timbangan telah mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak mau adil terhadap sesama dan akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual dan pembeli. Para pihak dalam

⁴⁴ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002) h. 221

⁴⁵ *Ibid*, h.156

jual beli harus memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku di dalam jual beli salah satunya adalah dilarang berbuat curang terhadap sesama karena hukumannya sangat pedih. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan di dalam masyarakat.

4. Prinsip-prinsip Hukum Islam Terkait Takaran atau Timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.⁴⁶

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat.⁴⁷ Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Muthaffifiin (83):1-3

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013) h. 9

⁴⁷ Viethzal Rivai, dkk, *Islamic Bussiness And Economic Ethics* Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasullullah SAW, Dalam Bisnis Keuangan dan Ekonomi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 53-54

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ

يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Kecelakaan besarlah orang-orang yang curang (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,(2) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.(3).”

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan mutaffifin. Berdasarkan ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka Wail.⁴⁸ Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.⁴⁹

C. Urf

1. Pengertian Urf

‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa pekataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal

⁴⁸ Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.* h.161

⁴⁹ *Ibid*, h.159

oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁵⁰ Pengertian tersebut juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli *syara'*, di antara contoh '*urf*' yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*.

Dengan demikian, '*urf*' mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka '*urf*' berbeda dengan *ijma'* karena '*ijma'*' merupakan kebiasaan dari kesepakatan para mujahidin secara khusus.⁵¹

2. Landasan Hukum '*Urf*'

Para ulama sepakat bahwa '*urf*' sah dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama dapat dijadikan dasar hujjah, imam syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada sutau kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu

⁵⁰ Ahmad Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015) h. 81

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.* h.128

berhujjah dengan ‘urf. Tentu saja ‘urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁵²

‘Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, seperti yang terkandung dalam Q.S. Al-A’raf (7):199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*“Jadilah Engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”*⁵³

Kata ‘urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh ulama fiqih dipahami sebagai suatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan semua kebiasaan yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan, misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik mudarabah ini sudah berkembang di bangsa Arab

⁵² Ahmad Sohari, *Op.Cit.* h. 84

⁵³ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005)

sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum.

3. Macam-macam '*Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi '*urf* dalam tiga macam:

1. Dari segi objeknya, '*urf* dibagi dalam: *al-urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dalam *al-urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
 - a. *Al-urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi: apabila seseorang mendatangi penjual daging, yang menjual bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.
 - b. *Al-urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu.

2. Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu *al-urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus).
 - a. *Al-urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual-beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri, dan biaya tambahan.
 - b. *Al-urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan sedangkan untuk cacat lainnya dalam barang itu, tidak dapat dikembalikan. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.⁵⁴

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* terbagi menjadi dua yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid* (rusak). *'Urf sahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontrak borongan, pembagian maskawin (mahar) yang didahulukan dan yang diakhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh

⁵⁴Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I* (bandung, CV. Pustaka Setia, 2000) h. 162

menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya.

Adapun '*urf fasid*', yaitu sesuatu telah saling dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.⁵⁵

4. Kedudukan '*Urf*'

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa '*urf al-shahih*' yaitu '*urf*' yang tidak bertentangan dengan syara'. Baik yang menyangkut dengan '*urf al-am*' dan '*urf al-khas*', maupun yang berkaitan dengan '*urf al-lafzhi*' dan '*urf al-amali*', dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.⁵⁶

'*Urf*' yang sah dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi para mujtahid atau para hakim dalam menentukan hukum, dengan alasan bahwa syari'at Islam dalam mengadakan hukum juga memperhatikan adat kebiasaan ('*urf*') yang berlaku pada masyarakat Arab. Ulama malikiyah banyak menetapkan hukum yang berdasarkan kepada perbuatan penduduk Madinah, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara', sedangkan Imam Syafi'i ketika di Baghdad yang berbeda dengan adat yang ada di Mesir.

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.* h. 135

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: logos wacana ilmu, 1999) h. 98

Sebaliknya '*urf*' yang fasid tidak bisa diterima karena bertentangan dengan nash, seperti kebiasaan orang Mekah jika bertawaf tidak berpakaian, atau menikahi ibu sendiri/ ibu tiri yang suaminya telah meninggal.

Ada beberapa perjanjian/perikatan yang sudah dibiasakan orang, seperti menggadaikan barang dengan syarat si penerima gadai dapat menggunakan barang tersebut, mengambil keuntungan tertentu dari modal kapital yang dijalankan orang lain atau perjanjian asuransi.⁵⁷

Sebagaimana ulama mengatakan bahwa jika memang perjanjian/perikatan tersebut sudah dibiasakan orang dan memang dibutuhkan sekali, maka diperbolehkan dan termasuk dalam bidang pengecualian atau kemurahan. Batas-batas dan lapangan-lapangan perjanjian/perikatan tersebut dapat ditetapkan ahli ijtihad berdasarkan penelitiannya.

⁵⁷ A. Hanafie M.A, *Ushul Fiqh* (Jakarta pusat: PT. Bumi Restu Jakarta, 1981) h. 147

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Legenda dan Sejarah Desa Gunung Batu

Sebelum Tahun 1971 desa Gunung Batu masih merupakan wilayah pedukuhan dan masuk wilayah desa Sumberejo, wilayah Gunung Batu dahulu tanah EX Erpah bekas perkebunan teh dan kopi yang dimiliki oleh penjajah Belanda. Setelah Belanda diusir dari bumi Indonesia termasuk di Sumber Mulyo setatus tanah dikuasai oleh CTN, seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk yang datang dari pulau Jawa makin lama makin padat jumlah penduduknya. Sehingga pada tahun 1971 mekar menjadi desa sendiri, pecahan dari desa Sumberejo yaitu desa Margoyoso yang wilayahnya terdiri dari 13 pedukuhan yaitu, Pedukuhan Margoyoso, Pedukuhan Margodadi, Sumber Agung II, Pedukuhan Margosari, Pedukuhan Tanjung sari, Pedukuhan Gunung Batu, Pedukuhan Sumber Agung, Dadapan, Simpang kanan, Argomulyo, Gunung Sari, Simpang Rimba dan Simpang Rowo. Sedangkan Nama dari Margoyoso adalah Margo= Buat , Yoso= Jalan arti dari Margoyoso adalah Membuat Jalan.

Tabel 1
Pergantian Kepala Desa di Desa Gunung Batu Kecamatan
Sumberejo

Nama	Kepala Desa Ke_	Periode Jabatan
Ali. AA (Alm)	1	Tahun 1971-1973
Petrus Basri (Alm)	2	Tahun 1974-1979
Sudiman (Alm)	3	Tahun 1981-1982
M.Said Supadi (Alm)	4	Tahun 1982-1986
Harjo Solekan (Alm)	5	Tahun 1986-1994
Harjo Solekan (Alm)	6	Tahun 1994-2003
Sumiyati	7	Tahun 2003-2008
Kojrat Prayitno	8	Tahun 2008-2014
Sudibyo	9	Tahun 2015-2018

Pada periode kepala desa ke-2 desa Gunung Batu mekar menjadi pedukuhan Simpang kanan dan Margo Mulyo, kedua desa ini menjadi desa sendiri. Pada Tahun 1986 Desa Gunung Batu dimekarkan lagi menjadi Desa Dadapan dan wilayahnya meliputi Dusun Gunung sari, Dusun Simpang Rowo dan Desa Margodadi wilayahnya meliputi dusun Sumber Agung II.

Setelah desa Dadapan dan desa Margodadi menjadi desa sendiri desa Gunung Batu membawahi 5 pedukuhan yaitu dusun Margoyoso, Margosari, Tanjung Sari, Gunung Batu dan Sumber Agung. Bertepatan dengan itu pada tahun 1986 desa Gunung Batu menjadi pusat ibu kota Kecamatan Sumberejo.

2. Kondisi Umum Desa Gunung Batu

a. Geografis

Desa Gunung Batu merupakan salah satu dari 13 Pekon di Wilayah Kecamatan Sumberejo, yang terletak di Ibukota Kecamatan Sumberejo. Pekon Gunung Batu mempunyai luas wilayah seluas 350 Hektar. Cuaca Desa Gunung Batu, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai cuaca kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo.

b. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Desa Gunung Batu mempunyai jumlah KK 1338 dan penduduk 5633 jiwa, yang tersebar dalam 5 wilayah dusun dengan perincian sebagaimana berikut:

Dusun Gunung Batu	: 306 jiwa
Dusun Margosari	: 285 jiwa
Dusun Tanjung Sari	: 395 jiwa
Dusun Margoyoso	: 305 jiwa
Dusun Sunber Agung	: 47 jiwa

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Gunung Batu adalah sebagai berikut:

Pra Sekolah	: 101 jiwa
SD	: 217 jiwa
SLTP	: 90 jiwa
SLTA	: 65 jiwa
D.3	: 7 jiwa
Sarjana	: 27 jiwa

3. Mata Pencaharian

Penggunaan Tanah di Desa Gunung Batu sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah sedangkansisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Karena Desa Gunung Batu merupakan pekon Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Petani	: 287 jiwa
Pedagang	: 130 jiwa
PNS	: 47 jiwa
Buruh	: 11 jiwa

c. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Gunung Batu secara garis besar adalah sebagai berikut:

Balai Desa	: 1 Unit
Jalan Kab.	: 1 Km
Jalan Kec.	: 1 Km
Jalan Desa	: 6 Km
Masjid	: 4 Unit

3. Masalah yang Dihadapi Desa

Berdasarkan Penjaringan masalah yang dilakukan disetiap dusun di dapat masalah sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Kurang validnya data base kependudukan
2. Tidak jelasnya tapal batas antar desa
3. Belum adanya tata ruang desa
4. Data desa belum lengkap

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Tidak adanya lapangan Sepak Bola
2. Gorong-gorong di dusun V kondisinya Jebol
3. Jalan usaha tani dari dusun I ke dusun VI perlu pengerasan.
4. Jalan usaha tani dari dusun III ke pekon dadapan perlu pengerasan/pengaspalan
5. Jalan penghubung dusun IV perlu di hotmix
6. Gorong-gorong di dusun I, III, IV perlu di rehap
7. Jalan lingkungan di RT 01 masih tanah
8. Tidak adanya ruang (trotoar) untuk pejalan kaki

9. Jalan lingkungan di dusun I sampai dusun II perlu di hotmix
 10. Jalan gang di RT 01 masih tanah
 11. Jalan perbatasan RT 7 dan RT 8 rusak/becek karena masih tanah
 12. Sebagian jalan dusun rusak dan badan jalan amblas terkikis air
 13. Tidak ada jalan (gang)
 14. Irigasi banyak yang rusak
 15. Jalan ke lokasi pertanian belum ada
 16. Banyak masjid dan mushola yang perlu direhap
 17. Taman Pendidikan Alquran (TPA) masih numpang
 18. Posyandu menumpang di rumah penduduk
 19. PKK, LPM, BHP belum mempunyai kantor
 20. Poskamling banyak yang rusak dan jumlahnya perlu ditambah
 21. Tidak ada perpustakaan desa
 22. Tidak ada pusat informasi desa
 23. Gapura selamat datang belum ada
 24. Gapuran tiap jalan dusun/gang belum ada
 25. Lampu penerangan jalan belum ada
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. SDM Perangkat Pekon masih rendah
 2. Belum optimalnya fungsi kelembagaan Pekon
 3. Kurangnya perhatian terhadap guru Paud, Guru Ngaji
 4. Penjaga makam perlu diperhatikan
 5. Perlunya biaya operasional untuk kelembagaan pekon
 6. Kurang aktifnya siskamling
 7. Fasilitas pemuda belum ada
 8. Perlunya perhatian terhadap anak yatim, jompo dan penduduk miskin.
 9. Pembinaan kelompok tani tidak ada
 10. Banyak rumah yang tidak layak huni

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1. Tidak adanya pelatihan UKM
 - 2. Kegiatan keagamaan kurang terkoordinir
 - 3. Kegiatan pemuda belum terfasilitasi
 - 4. Pelatihan dan pembinaan aparat pekon belum ada
 - 5. Kurangnya sarana permodalan petani
 - 6. Belum adanya BUMDES

B. Sistem Jual Beli Pisang dan Talas di Desa Gunung Batu

Berdasarkan penjabaran pada sub bab sebelumnya yang terkait dengan sistem jual beli pisang dan talas yang berlangsung di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo, dianalisis secara rasionalistik pembenturan masalah ini sehingga mudah untuk dipahami.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan telah disepakati kedua belah pihak.

Pengurangan berat timbangan adalah penggalan yang diambil secara sengaja dari suatu berat pokok benda pada saat proses penimbangan dilakukan. Pengurangan berat timbangan yang diterapkan tidak mempunyai dasar yang jelas dan hanya mengira-ngira, berat pengurangan timbangan bekisar antara 10%-20% dari berat pokok. Manipulasi timbangan adalah

merubah atau mengatur timbangan baik dengan tangan atau alat tertentu sehingga keakuratan dari timbangan dapat berubah sesuai dengan yang diinginkan oleh yang merubahnya. Manipulasi timbangan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau menambah berat dari suatu benda sehingga salah satu pihak dapat memperoleh keuntungan lebih. Pengurangan berat timbangan adalah penggalan yang diambil secara sengaja dari suatu berat pokok benda pada saat proses penimbangan dilakukan.

Sistem yang berlaku pada transaksi jual beli ini mendapatkan respon yang kurang baik karena pihak petani mengalami kerugian dan menguntungkan tengkulak. Pengurangan berat timbangan seharusnya dilakukan dengan sewajarnya karena petani pun memaklumi jika talas yang baru dipanen banyak terdapat tanah yang menempel pada buahnya seperti halnya pisang yang terdapat batang pada tengahnya (bonggol).⁵⁸

Petani pisang dan talas merasa dirugikan karena tengkulak memanipulasi timbangan, manipulasi terjadi ketika timbangan belum menunjukkan titik seimbang, petani tidak bisa melakukan atau melarang hal tersebut karena adanya beberapa faktor yang mendukung diantaranya karena tidak enak hati, adanya sangkutan hutang piutang antara petani dan tengkulak, selain itu petani juga menyadari bahwa tidak bisa berbuat lebih karena perbuatan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan penerapan

⁵⁸Wawancara Bapak Siman petani pisang dan talas pada hari sabtu 28 April 2018 pukul: 10.00 WIB

pengurangan berat timbangan dan manipulasi juga diterapkan oleh tengkulak lain.⁵⁹

Sebagian besar masyarakat desa Gunung Batu kurang memahami ilmu hukum ekonomi syariah terutama petani pisang dan talas. Pengurangan berat timbangan sudah terjadi turun-temurun dan menjadi adat kebiasaan masyarakat. Petani tentu keberatan tapi tidak adanya pilihan lain untuk menjual ditempat lain, karena ditempat lain pihak tengkulak juga menerapkan sistem pengurangan berat timbangan dan manipulasi timbangan maka petani hanya bisa pasrah dengan ketentuan ini.⁶⁰

Menurut pendapat Bapak Ari petani pisang dan talas pengurangan berat timbangan adalah hal yang wajar dilakukan karena mungkin hasil panen akan mengalami penyusutan setelah ditimbang, akan tetapi beliau tidak membenarkan manipulasi timbangan ketika jarum timbangan belum menunjukkan angka yang seimbang. Seharusnya diseimbangkan terlebih dahulu kemudian menentukan berapa berat pokok daripada hasil panen saat itu.⁶¹

Dibenarkan *syara'* dalam arti baik proses atau objek yang diperjualbelikan. Benda yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan terimakan dan merupakan milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda dapat

⁵⁹ Wawancara Bapak Mardi petani pisang dan talas pada hari minggu 29 April 2018 pukul: 11.00 WIB

⁶⁰ Wawancara Bapak Sukis petani pisang dan talas pada hari sabtu 28 April 2018 pukul: 11.00 WIB

⁶¹ Wawancara Bapak Ari petani pisang dan talas pada hari sabtu 28 April 2018 pukul: 09.00 WIB

mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.

Manipulasi yang dilakukan dalam penimbangan adalah dengan cara langsung menembak berat pokok pada saat proses penimbangan dilakukan tanpa menunggu jarum timbangan tersebut berada pada titik seimbang.⁶² Jual beli dikatakan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku di dalam jual beli. Akan tetapi, selain harus memperhatikan rukun dan syarat, kedua belah pihak harus memperhatikan aturan yang ada di dalam Hukum Islam seperti diharuskan untuk menepati timbangan dan tidak mempermainkan timbangan.

Profesi masyarakat desa Gunung Batu yang pada umumnya adalah disektor pertanian, masyarakat yang ada di desa tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hasil dari jual beli kopi, cengkih, lada, dll. Namun untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat desa Gunung Batu menggantungkan kepada hasil penjualan pisang dan talas.

Jual beli pisang dan talas pada umumnya dibebani pengurangan berat timbangan yang memberatkan petani. Menurut salah satu masyarakat yang sudah sejak lama berprofesi menjadi petani pisang dan talas, mereka tetap diam dengan pembebanan pengurangan berat timbangan dalam sistem jual

⁶² Wawancara Bapak Bandi petani pisang dan talas pada hari sabtu 28 April 2018 pukul: 15.00 WIB

beli pisang dan talas karena apabila berkomentar dan mengeluh takut tidak ada yang akan membeli hasil panennya tersebut, kalau pun pindah ke tengkulak yang lain akan terjadi hal yang sama karena tengkulak yang lain juga menerapkan hal yang serupa. Meskipun mereka merasa keberatan dengan sistem jual beli seperti ini tetapi mereka masih melakukan hingga saat ini karena mata pencaharian mereka sehari-hari hanya melalui sektor pertanian, dan belum adanya pihak yang jujur dan amanah yang dapat masyarakat percayakan untuk meneruskan kelangsungan bisnis jual beli pisang dan talas sehingga tidak ada masyarakat kecil yang merasa hak-haknya dirugikan oleh salah satu pihak.

Sebagian pihak petani ada yang merasa rela dengan adanya praktik pengurangan berat timbangan dalam sistem jual beli pisang dan talas karena mereka merasa itu adalah hal yang wajar dilakukan untuk setiap jual beli dari hasil bumi. Namun, banyak pihak yang juga merasa keberatan dengan adanya praktik demikian, karena pengurangan berat timbangan yang dibebankan terkadang tidak wajar dari jumlah berat pokok. Jual beli pisang dan talas dengan penerapan pengurangan berat timbangan dan ketidaktetapan dalam penimbangan dilakukan untuk menghindari kemungkinan kerugian serta kehilangan berat yang dimungkinkan akan terjadi.

Berikut adalah daftar pengurangan berat timbangan yang diterapkan oleh pihak tengkulak setelah ditentukan sampel yang ada di lapangan:

Tabel 2
Daftar Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas

No.	Nama Tengkulak	Jumlah pengurangan yang ditetapkan
1.	Rudi	1 kg-2 kg
2.	Nasip	10% dari berat pokok
3.	Karyadi	15%-20% dari berat pokok

Data di atas diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak tengkulak, data pengurangan timbangan tersebut ditetapkan oleh tengkulak yang jumlahnya bervariasi antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Dari pihak tengkulak ada yang menggunakan satuan kilogram (kg) dan ada yang menggunakan persentase (%) 10%-20% yang dibebankan pengurangan wajib dari berat pokok pisang dan talas. Jumlah pengurangan yang ditetapkan juga tidak pasti tergantung keadaan hasil panen dan tergantung pada pihak tengkulak, ketentuan tersebut tentu tidak diketahui oleh petani melainkan hanya kesepakatan sepihak.

Berikut daftar jawaban responden terhadap penerapan potongan/pengurangan berat timbangan.

Tabel 3
Respon Petani Pisang dan Talas terhadap Penerapan Pengurangan
Timbangan

No	Nama	Pembebanan Pengurangan Timbangan
1.	Mardi	Keberatan
2.	Sukis	Kebertan
3.	Kariyadi	Keberatan
4.	Bandi	Keberatan
5.	Ari	Setuju

Sumber: Wawancara petani pisang dan talas tahun 2018

Berdasarkan tabel hasil wawancara diatas pembebanan potongan/pengurangan wajib sebanyak 4 dari 5 orang petani merasa keberatan atas pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh pihak tengkulak dan 1 orang petani merasa tidak keberatan dengan adanya pengurangan tersebut.

Para pihak dalam jual beli pisang dan talas dengan sistem manipulasi dan pengurangan berat timbangan yang mereka lakukan tidak memikirkan dampak yang timbul akibat tindakan yang mereka lakukan selama ini, praktik ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak hanya demi mendapatkan keuntungan lebih dan enggan menanggung kerugian sehingga beban kerugian dilimpahkan kepada pihak petani.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa sistem jual beli pisang dan talas yang berlangsung di Desa Gunung Batu menerapkan pengurangan wajib dari berat pokok dan manipulasi timbangan hal tersebut

tentunya merugikan pihak petani. Hal ini sudah menjadi kebiasaan buruk yang masih dilakukan hingga saat ini.

C. Faktor dan Dampak Adanya Praktik Pengurangan Berat Timbangan dalam Sistem Jual Beli Pisang dan Talas di Desa Gunung Batu

Setiap kejadian yang sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat tentu ada hal yang melatarbelakangi dan menjadi faktornya. Seperti halnya pengurangan dalam jual beli pisang dan talas di Desa Gunung Batu, Kecamatan Sumberejo. Awal mula dilakukannya pengurangan berat timbangan ini adalah ketika talas yang baru dipanen tersebut terdapat tanah yang menempel pada kulitnya sehingga oleh tengkulak dilakukan pemotongan berat timbangan. Seperti halnya talas, pisang juga dikenakan pengurangan berat timbangan karena pisang yang dijual kepada tengkulak dalam keadaan mentah dan masih terdapat tangkai pisang (bonggol) hal ini yang melandasi adanya pengurangan berat timbangan tersebut.⁶³

Adanya praktik pengurangan timbangan dalam sistem jual beli pisang dan talas adalah karena terdapat kadar air, tanah yang menempel pada talas, dan terdapat tandan pada pisang tersebut. Pengurangan berat timbangan dilakukan untuk mengantisipasi pisang dan talas untuk kehilangan berat,

⁶³Wawancara Bapak Rudi tengkulak pisang dan talas pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 11:000
WIB

sehingga tengkulak menerapkan pengurangan berat timbangan tersebut untuk meminimalisir kerugian.⁶⁴

Setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia pasti ada dampak yang terjadi begitu juga dengan pengurangan berat timbangan dalam sistem jual beli pisang dan talas yang terjadi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo. Dengan adanya praktik tersebut justru akan menimbulkan masalah baru dalam sistem jual beli pisang dan talas, dengan pembebanan pengurangan berat timbangan membuat petani melakukan hal-hal yang kurang baik seperti mencampur talas kualitas bagus dengan batang/bonggol talas yang tidak layak jual untuk tujuan menambah berat dan untuk menutupi pengurangan.⁶⁵

Petani yang melakukan penimbangan kepada salah satu pihak pembeli dilatarbelakangi karena pihak tengkulak mau meminjamkan sejumlah uang kepada petani. Dengan menjual pisang dan talas dengan sistem terikat ini pihak petani menerima ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak tengkulak. Selain itu, jarum timbangan yang digunakan ketika titik berat belum seimbang dan langsung menembak dan menentukan berat dari pisang dan talas tersebut.

⁶⁴ Wawancara Bapak Nasip tengkulak pisang dan talas pada tanggal 29 April 2018 pukul: 15.00 WIB

⁶⁵ Wawancara Bapak Bandi petani pisang dan talas pada tanggal 28 April 2018 pukul 10:00 WIB

Tengkulak beranggapan bahwa hal ini adalah wajar untuk dilakukan untuk setiap jual beli dari hasil bumi, dan sudah menjadi kebiasaan menurun sejak dahulu yang dilakukan oleh banyak pihak tengkulak, sehingga ada sebagian pihak yang merasa tidak bersalah karena kebiasaan yang mereka lakukan.⁶⁶ Semua respon tengkulak menunjukkan alasan yang sama persis yaitu untuk meminimalisir kerugian pihak tengkulak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang menjadi narasumber yang ada di desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo, ada pihak-pihak yang mengetahui aturan Hukum Islam dalam jual beli, namun tidak sedikit juga yang tidak mengetahui jual beli menurut Hukum Islam, dari sebanyak 3 pihak tengkulak yang diwawancarai, 1 diantaranya mengetahui aturan Hukum Islam dan 2 pihak tidak mengetahui aturan jual beli menurut Hukum Islam, sedangkan dari pihak petani 2 diantaranya mengetahui aturan jual beli menurut perspektif hukum Islam, dan 3 diantaranya tidak mengetahui aturan yang terdapat dalam hukum Islam.

Praktik yang demikian akan menimbulkan perasaan bersalah yang harus ditanggung oleh para pihak yang terlibat dalam sistem jual beli pisang dan talas yang didasari oleh ketidakjujuran yang dilakukan oleh sebagian pihak. Selain menimbulkan rasa tidak percaya dan saling curiga, kebiasaan turun-temurun tersebut akan menghasilkan trik-trik kecurangan baru yang mungkin

⁶⁶ Wawancara Bapak Karyadi tengkulak pisang dan talas pada tanggal 28 April 2018 pukul 16.00 WIB

dilakukan oleh pihak yang mencari keuntungan secara berlebih dan pihak yang merasa hak-haknya telah dirugikan dalam sistem jual beli.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas di Desa Gunung Batu

Masyarakat yang ada di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo sebagian besar berprofesi sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, diantaranya petani kopi, padi, lada, pisang, talas dan lain sebagainya. Tidak semua petani yang bertempat tinggal di desa Gunung Batu juga memiliki kebun di desa tersebut, akan tetapi sebagian dari petani memiliki kebun yang berada di desa lain bahkan ada juga yang berada di kecamatan lain dengan jarak tempuh yang lumayan jauh. Akhir-akhir ini memang harga pisang dan talas jauh lebih mahal dibandingkan tahun-tahun yang lalu, karena permintaan pasar semakin meningkat sehingga masyarakat desa Gunung Batu melakukan penanaman pisang dan talas mengingat kembali bahwa usia tanamnya tidak terlalu lama dan bisa menjadi tanaman tumpang sari dengan tanaman lainnya seperti tanaman kopi. Dengan alasan demikian banyak petani yang menanam pisang dan talas karena tidak memerlukan perawatan khusus.

Jual beli pisang dan talas yang berlangsung di desa Gunung Batu, Kecamatan Sumberejo sudah berlangsung sejak lama dan telah banyak pihak yang telah menjadi tengkulak (bos) yang membeli hasil panen dari petani. Penimbangan atas transaksi jual beli dilakukan ketika petani panen dan langsung

menimbang hasil panennya ditempat tengkulak, hal ini dikarenakan faktor ekonomi dan kebutuhan keluarga.

Awal mula dilakukannya pengurangan berat timbangan ini adalah ketika talas yang baru dipanen tersebut terdapat tanah yang menempel pada kulitnya sehingga oleh tengkulak dilakukan pemotongan berat timbangan. Seperti halnya talas, pisang juga dikenakan pengurangan berat timbangan karena pisang yang dijual kepada tengkulak dalam keadaan mentah dan masih terdapat tangkai pisang (bonggol) hal ini yang melandasi adanya pengurangan berat timbangan tersebut. Namun hal tersebut justru menjadi kebiasaan masyarakat Desa Gunung Batu, menerapkan pengurangan berat timbangan dalam transaksi jual beli pisang dan talas yang memberatkan pihak petani. Selain pengurangan berat timbangan, muncul masalah baru yaitu manipulasi timbangan yang dilakukan oleh tengkulak.

Pengurangan berat timbangan dan manipulasi timbangan sudah terjadi secara turun-temurun. Alasan tengkulak melakukan pengurangan dan manipulasi timbangan adalah untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan karena penyusutan bobot atau berat dari pisang dan talas tersebut, penyusutan mungkin terjadi ketika pisang dan talas disimpan terlalu lama dikarenakan menunggu pisang dan talas mencapai jumlah yang cukup banyak dan kemudian dijual oleh pihak tengkulak ke Jakarta.

Praktik pengurangan berat timbangan dilakukan secara sepihak yang dilakukan oleh tengkulak tanpa adanya kesepakatan dengan petani. Penimbangan dilakukan dengan timbangan gantung yaitu timbangan yang diletakkan

menggantung dan bekerja seperti tuas, timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa. Penimbangan dilakukan sekali dan tengkulak tidak menunggu jarum timbangan berada pada titik seimbang kemudian langsung menembak berapa berat pokok dari pisang dan talas tersebut. Setelah ditimbang tengkulak menentukan jumlah pengurangan tanpa adanya kesepakatan dengan petani.

Siklus harga dalam jual beli pisang dan talas mengikuti penetapan oleh pihak tengkulak dengan berdasarkan kepercayaan, jadi petani atau penjual mempercayakan sepenuhnya harga kepada tengkulak. Pihak tengkulak yang sudah lama dalam profesi ini tentu saja memiliki pelanggan yang cukup banyak. Dalam melakukan jual beli ini petani (penjual) bebas melakukan penimbangan dengan pihak manapun. Akan tetapi ada sebagian pihak melakukan penimbangan secara keterikatan kepada pihak tengkulak yang sudah menjadi langganan mereka sejak dahulu.

Petani terpaksa menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan alasan adanya sangkutan hutang piutang dengan pihak tengkulak, sehingga petani membayar hutang nya dengan menjual hasil panennya kepada tengkulak tersebut, kemudian hasil dari penjualannya akan dipotong sesuai jumlah hutang. Tidak ada yang berubah ketika petani menjual hasil panennya kepada tengkulak lainnya, karena tengkulak yang lain juga menerapkan pengurangan berat timbangan dan manipulasi timbangan.

Menjual pisang dan talas dengan sistem bebas biasanya dilakukan oleh petani yang tidak terikat kepada salah satu tengkulak yang ada di Desa Gunung Batu. Biasanya petani yang menjual secara bebas adalah petani yang tidak memiliki hutang kepada salah satu pihak tengkulak, atau petani bisa memilih kemana akan menjual hasil panennya kepada tengkulak yang harga belinya lebih tinggi, jadi petani bebas menjual hasil panennya dengan leluasa. Pengurangan berat timbangan dan manipulasi tetap diterapkan dalam setiap transaksi walaupun petani tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan tengkulak, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa dalam sistem jual beli pisang dan talas. Penjualan pisang biasanya dilakukan sekali selama seminggu tergantung ada atau tidaknya pisang yang akan dipanen, sedangkan untuk talas bisa dipanen kurang lebih 3-4 bulan setelah penanaman.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas di Desa Gunung Batu

Praktik jual beli pisang dan talas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Batu mengandung unsur ketidakadilan karena terdapat ketidaksesuaian dalam penimbangan dan dibebaninnya pengurangan wajib dalam setiap penimbangan yang dilakukan oleh pihak tengkulak untuk menghindari kerugian. Jual beli itu diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi jual beli juga terdapat aturan dan kaidah yang harus dipatuhi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan didalam jual beli dilarang adanya unsur penipuan dan tidak menepati atau mempermainkan timbangan.

Praktik jual beli pisang dan talas yang terjadi di Desa Gunung Batu merugikan pihak petani karena terjadi manipulasi timbangan pada saat penimbangan berlangsung, penimbangan dilakukan dengan tidak menunggu jarum timbangan dalam keadaan seimbang dan langsung menembak berapa berat pokoknya, kemudian setelah penimbangan selesai akan ditetapkan berapa berat yang akan dikurangi, pengurangan yang diberlakukan bekisar antara 10%-20% dari berat pokok. Praktik tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, jual beli boleh dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan rukun seperti prinsip yang ada di dalam muamalah yaitu prinsip kerelaan, bermanfaat, tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang. Adapun rukun jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, sighat (ijab kabul). Syarat penjual dan pembeli haruslah baligh, tidak pemboros, tidak ada paksaan dan atas kehendak diri sendiri.

Adapun macam-macam jual beli yaitu jual beli shahih maksudnya adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli *khoiru shahih* adalah jual beli yang tidak berkenaan dengan hukum *syara'*. Seperti menjual barang yang tidak ada, atau barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli dan mengandung unsur manipulasi serta pengurangan wajib yang dibebankan dalam jual beli. Terdapat beberapa prinsip dalam bermuamalah, yaitu muamalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan

umat manusia, dan setiap bentuk muamalah hukumnya diperbolehkan sampai adanya dalil yang melarang.

Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli yang demikian sebenarnya telah memenuhi unsur jual beli yaitu sudah adanya pihak yang melakukan transaksi dan perjanjian jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli dalam kasus ini disebut sebagai pegepul dan petani. Sedangkan benda yang menjadi objek jual beli adalah pisang dan talas, jual beli tersebut berlangsung setelah kedua belah pihak melangsungkan akad dalam jual beli, maka sejak saat itu terjadilah akad bahwa tengkulak menyerahkan uang dan petani menyerahkan barang sebagai objek jual beli. Berlangsungnya transaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syaratnya karena hal ini yang menentukan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa terdapat suatu masalah di dalam jual beli yaitu dengan adanya praktik pengurangan berat timbangan, dan manipulasi timbangan yang dilakukan oleh pihak tengkulak yang berada di Desa Gunung Batu, Kecamatan Sumberejo. Persoalan yang terjadi tersebut merupakan jual beli yang tidak dibenarkan oleh Islam, karena hanya mengedapankan memperoleh keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli.

Jual beli pisang dan talas yang berlangsung di masyarakat Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo terbukti mengandung praktik manipulasi dalam

penimbangan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar dalam bermuamalah sebagaimana yang terdapat dalam Q.S As-Syu'ara (26):183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Dari ayat diatas sebagai umat manusia dilarang untuk saling merugikan pihak lain. (dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya. Lafal *Ta'tsau* ini berasal dari *'Atsiya* yang artinya membuat kerusakan; dan lafal *Mufsiidina* merupakan hal atau kata keterangan keadaan daripada *'Amilnya*, yaitu lafal *Ta'tsau*.⁶⁷

Dalam Q.S An-Nisa' (4):29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

⁶⁷<https://tafsirq.com/26-asy-syuara/ayat-183> diakses pada hari Selasa 07 Agustus 2018 pukul 12:15 WIB

Praktik jual beli pisang dan talas yang berlangsung di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo telah terbukti terdapat adanya praktik manipulasi, dan pengurangan berat timbangan hal tersebut merugikan salah satu pihak, sehingga praktik jual beli ini tidak dibenarkan oleh Hukum Islam. Praktik jual beli tersebut merupakan jual beli yang *fasid* (rusak), karena merugikan pihak petani.

Jual beli tersebut melanggar aturan jual beli yang terdapat dalam Hukum Islam. Syariat Islam dengan jelas melarang adanya praktik manipulasi timbangan apalagi merugikan salah satu pihak dan telah menjadi suatu kebiasaan buruk di suatu masyarakat. Meskipun pihak tengkulak dalam jual beli pisang dan talas yang berlangsung di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo memiliki jenjang pendidikan dari tingkat SMP hingga SMA yang mengetahui aturan jual beli menurut Hukum Islam, namun pada kenyataannya mereka masih melakukan kebiasaan buruk tersebut tanpa memikirkan dosa yang harus mereka tanggung di akhirat kelak.

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam Hukum Islam sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari transaksi jual beli. Namun jual beli pisang dan talas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Batu justru menimbulkan akibat buruk seperti kerugian yang harus ditanggung oleh

salah satu pihak. Sebenarnya dalam transaksi jual beli harus mengedepankan prinsip kejujuran agar tercapainya suatu tujuan dalam transaksi jual beli.

Transaksi jual beli yang terjadi di Desa Gunung Batu ini mengandung unsur '*urf*' atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun, seharusnya '*urf*' yang dapat dijadikan dasar hukum adalah '*urf*' yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Islam Al-Qura'an dan Sunnah Rasulullah, sedangkan transaksi jual beli yang terjadi di Desa Gunung Batu mengandung unsur kemudharatan dan mengandung '*urf fasid*' yang seharusnya tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh masyarakat. '*Urf*' yang rusak tidak harus memeliharanya, karena memelihara itu bertentangan dengan dalil syara'. Para ulama menyepakati bahwa '*urf fasid*' harus dijauhkan dari kaidah-kaidah pengambilan dan penetapan hukum. '*Urf fasid*' dalam keadaan darurat pada lapangan muamalah tidak otomatis membolehkannya. Keadaan darurat tersebut dapat ditoleransi hanya apabila benar-benar darurat dan dalam keadaan sangat dibutuhkan.⁶⁸

Dalam Islam jual beli tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga mencari ridha Allah SWT. Berdasarkan dari penjabaran dan persoalan dalam sistem jual beli pisang dan talas di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo, bahwa sistem jual beli dengan sistem pengurangan timbangan dan manipulasi tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam karena

⁶⁸Satria Effendi, *Op.Cit.* h. 157

sistem jual beli dalam Islam harus transparan dan terbuka terlebih lagi mengenai timbangan (takaran) seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Isra' (17):35.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang tinjauan Hukum Islam tentang pengurangan berat timbangan dalam sistem jual beli pisang dan talas yang terjadi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pisang dan talas yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut, kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat cenderung mengarah pada '*urf fasid*' yang tidak bisa dijadikan dasar hukum atau aturan, dan seharusnya ditinggalkan. ketentuan yang diterapkan dalam sistem jual beli pisang dan talas bersumber dari pihak tengkulak, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jual beli yang dilakukan dengan penerapan pengurangan berat timbangan dan manipulasi timbangan yang dilakukan pihak tengkulak dimana praktik cenderung merugikan petani.
2. Menurut Hukum Islam jual beli dengan sistem atau cara tersebut tidak diperbolehkan, alasannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam Hukum Islam yaitu karena tidak ditepatinnya timbangan, serta adanya manipulasi timbangan yang sudah menjadi

kebiasaantidak baik dalam sistem jual beli pisang dan talas sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama petani. Islam dengan tegas melarang hal-hal yang berkenaan dengan pengurangan berat timbangan yang larangannya terdapat dalam sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui praktik pengurangan berat timbangan menurut pandangan Hukum Islam yang diterapkan dalam jual beli pisang dan talas yang berlangsung di Desa Gunung Batu, memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak tengkulak dalam jual beli pisang dan talas seharusnya meninggalkan praktik ketidaksesuaian dalam penggunaan timbangan dan meminimalisir pengurangan wajib yang diterapkan
2. Prinsip kejujuran harus diutamakan dalam sistem jual beli pisang dan talas
3. Pihak petani dan tengkulak harus lebih memperhatikan etika dalam jual beli pisang dan talas sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan
4. Perlunya pengetahuan tentang Hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan khususnya pada sistem jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002)
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al ushuljilid 1* (Dar al Kutub al 'ilmiyah, Beirut, 1983)
- Al-Jaziri, Lihat. *Fiqh Madzahib al-Arba'ah*, (Jakarta)
- Al-kahlani, *Subul al-Salam* (Bandung)
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)
- Amirudin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 3*, (Jakarta: Bima Aksara, 1981)
- Bashir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Jakarta: 2002)
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet-I
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010)
- Effendi, M Zein Satria. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana Predana Media Group, 2005)
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, (Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994)
- Hanafie, A. *Ushul Fiqh* (Jakarta pusat: PT. Bumi Restu Jakarta, 1981)

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)

<https://tafsirq.com/26-asy-syuara/ayat-183> diakses pada hari Selasa 07 Agustus 2018 pukul 12:15 WIB

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/tengkulak.html>, diakses pada pukul 20:20 WIB pada hari Selasa, 23 Oktober 2018

<https://www.caratekno.com/2013/10/macam-macam-timbangan-yang-sering.html>, diakses pada pukul 19:30 WIB pada hari Selasa, 23 Oktober 2018

Ja'far, Khumaidi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permata Publishing, 2016)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Hidakarya, 1997)

KBBI Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Balai Pustaka, (Jakarta, 2002)

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1993)

Koentjoroningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991)

Lubis, Suharwadi K. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Majah, Ibnu. (2/1322) no. 4019, Abu Nu'aim, al-Hakim dkk.

Moeleng, J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya)

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

Nasir, Muhammad. *Metodologi Penelitian Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986)

- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Rivai, Viethzal dkk. *Islamic Bussiness And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasullullah SAW*, Dalam Bisnis Keuangan dan Ekonomi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012)
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013)
- Sohari, Ahmad. *Ushul Fiqh* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2008)
- Sudjana, Nana. *Pedoman Penyusunan Skripsi, tesis dan disertasi* (Jakarta, Rineka Cipta edisi revisi III cet ke-4, 1998)
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqih I* (bandung, CV. Pustaka Setia, 2000)

Daftar pertanyaan tengkulak pisang dan talas

1. Sejak kapan bapak menjadi tengkulak pisang dan talas?
2. Mengapa bapak memilih profesi tersebut dan apa yang melatar belakangnya?
3. Apakah yang menjadi tujuan dan alasan bapak melakukan pengurangan berat timbangan dalam sistem jual beli pisang dan talas?
4. Jenis timbangan apa yang bapak gunakan untuk melakukan penimbangan?
5. Berapa besar pengurangan pisang dan talas yang bapak terapkan dalam penimbangan?
6. Apakah menurut bapak menerapkan sistem pengurangan berat timbangan itu adalah hal yang wajar?
7. Apakah penimbangan dan permainan timbangan sudah menjadi tradisi turun-menurun?
8. Apakah bapak mengetahui jual beli yang diperbolehkan menurut hukum islam?

Daftar pertanyaan petani pisang dan talas

1. Sejak kapan bapak menjadi petani pisang dan talas?
2. Apakah bapak memiliki kebun sendiri atau hanya menggarap kebun milik orang lain?
3. Berapa berat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pengepul?
4. Apakah bapak merasa keberatan dengan pengurangan yang dilakukan dalam sistem jual beli pisang dan talas?
5. Apakah pengurangan berat timbangan yang dilakukan oleh tengkulak itu wajar untuk diterapkan?
6. Menurut bapak apakah timbangan yang dilakukan oleh tengkulak tersebut akurat atau sudah dimanipulasi?
7. Apakah bapak mengetahui jika Hukum Islam melarang praktik manipulasi pengurangan timbangan?
8. Mengapa bapak hanya pasrah dan diam pada saat pihak tengkulak melakukan pengurangan berat timbangan tersebut?
9. Apakah bapak mengetahui jual beli menurut hukum islam?